



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari kegiatan akuntansi. Menurut Weygandt *et al.* (2015), kegiatan akuntansi terdiri dari proses mengidentifikasi transaksi ekonomik yang relevan dengan bisnis perusahaan, kemudian mencatatnya secara sistematis dan kronologis, dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pihak lain melalui laporan keuangan. Definisi laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Hery (2014) dalam Sadih dan Priyadi (2015), laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

PSAK No. 1 (IAI, 2016) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2016), kinerja keuangan terefleksikan oleh akuntansi akrual yang

menggambarkan dampak transaksi dan peristiwa serta kondisi lainnya atas sumber daya ekonomi dan klaim entitas pelapor pada periode saat dampak tersebut terjadi, meskipun penerimaan dan pembayaran kas terjadi di periode yang berbeda. Hal ini penting karena memberikan dasar yang lebih baik dalam menilai kinerja masa lalu dan masa depan entitas, dibandingkan informasi yang hanya menyediakan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas selama periode tersebut.

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2016), laporan keuangan menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan investor saat ini dan investor potensial mengenai pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang bergantung pada imbal hasil (*return*) yang diharapkan dari investasi pada instrumen tersebut, misalnya dividen dan *capital gain*. Keputusan pemberi pinjaman saat ini, pemberi pinjaman potensial, dan kreditor lainnya tentang penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya bergantung pada pembayaran pokok dan bunga yang diharapkan. Pengguna laporan keuangan lainnya menurut Weygandt *et al.* (2015) meliputi manajemen sebagai pihak internal dan pihak eksternal lainnya yang terdiri dari otoritas pajak, pemerintah, konsumen, *supplier*, dan serikat pekerja.

Untuk memenuhi tujuan laporan keuangan, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan harus dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan oleh pengguna. Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2016), agar informasi keuangan berguna

bagi pihak yang mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan, maka informasi tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif fundamental.

Karakteristik kualitatif fundamental laporan keuangan terdiri dari:

1. Relevansi

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan yang digunakan pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) masa depan, sedangkan informasi keuangan memiliki nilai konfirmasi jika menyediakan masukan (konfirmasi atau perubahan) tentang evaluasi sebelumnya.

2. Representasi tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka. Selain itu, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, laporan keuangan harus disajikan secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Lengkap berarti penjabaran seluruh informasi yang diperlukan agar dapat memahami fenomena yang digambarkan. Netral berarti pemilihan atau penyajian informasi keuangan tanpa bias (tidak dimanipulasi). Bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam menjelaskan fenomena dan

dalam proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi, namun tidak berarti akurat secara sempurna dalam segala hal.

Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2016), komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

Laporan posisi keuangan paling sedikit menyajikan jumlah pos-pos sebagai berikut: aset tetap, properti investasi, aset takberwujud, aset keuangan, investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang dan piutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, utang dagang dan utang lain, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, kepentingan nonpengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (IAI, 2016).

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.

Laporan laba rugi menyajikan jumlah pos-pos sebagai berikut selama periode: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan. Selain itu, bagian penghasilan komprehensif lain

menyajikan jumlah pos-pos untuk penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat (termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas) dan dikelompokkan sesuai SAK, yaitu tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi (IAI, 2016). Menurut Kieso *et al.* (2014), secara umum laporan laba rugi perusahaan menyajikan beberapa atau semua bagian dan total dari hal-hal berikut:

- a. *Sales* atau *revenue*. Terdiri dari komponen penjualan, diskon, *allowances*, retur dan informasi terkait lainnya, yang memberikan informasi mengenai jumlah penjualan bersih (*net sales*) atau pendapatan bersih (*net revenue*).
- b. *Cost of goods sold*. Menunjukkan harga pokok penjualan yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan penjualan.
- c. *Gross profit*. Merupakan jumlah laba kotor yang diperoleh dari jumlah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan.
- d. *Selling expenses*. Meliputi beban-beban yang terkait dengan aktivitas penjualan.
- e. *Administrative or general expenses*. Melaporkan beban administrasi umum.
- f. *Other income and expenses*. Meliputi penghasilan dan beban lain-lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori

komponen laporan laba rugi di atas. Contohnya adalah kerugian atau keuntungan penjualan aset, penurunan nilai wajar aset, biaya restrukturisasi, pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga.

- g. *Income from operations*. Merupakan pendapatan perusahaan dari kegiatan operasi yang diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan beban penjualan, beban administrasi dan umum, dan dikurangi/ditambah penghasilan dan beban lain-lain.
- h. *Financing cost*. Meliputi beban keuangan perusahaan, misalnya beban bunga.
- i. *Income before income tax*. Merupakan total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh dari *income from operations* dikurangi *financing cost*.
- j. *Income tax*. Menunjukkan jumlah pajak penghasilan yang dikenakan atas *income before income tax*.
- k. *Income from continuing operations*. Merupakan hasil kinerja yang berasal dari usaha perusahaan yang masih berlangsung. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian yang berasal dari usaha yang dihentikan maupun penjualan atas usaha yang dihentikan, maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlahnya langsung dilaporkan sebagai *net income*.

- l. *Discontinued operations*. Menunjukkan jumlah keuntungan atau kerugian yang dihasilkan akibat adanya penghentian usaha dan/atau penjualan atas usaha yang dihentikan.
- m. *Net income*. Merupakan hasil bersih kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu.
- n. *Non-controlling interest*. Menyajikan alokasi dari *net income* kepada pemegang saham mayoritas sampai minoritas.
- o. *Earning per share*. Menunjukkan jumlah laba per lembar.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;

Menurut IAI (2016), laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali.
- b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif.
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik

dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

4. Laporan arus kas selama periode.

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut (IAI, 2016). Menurut Weygandt *et al.* (2015), laporan arus kas mengklasifikasikan arus kas masuk dan keluar terdiri dari 3 aktivitas, yaitu:

- a. *Operating activities*. Meliputi efek kas yang disebabkan oleh transaksi yang menimbulkan pendapatan dan beban.
- b. *Investing activities*. Meliputi pembelian dan penjualan investasi dan aset tetap, pemberian pinjaman dan penerimaan atas pelunasan pinjaman.
- c. *Financing activities*. Meliputi penerbitan dan pelunasan utang jangka panjang (obligasi atau wesel bayar), serta penerbitan dan pembelian kembali saham.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya.

7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan.

2.2 Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Menurut Anggraeni dan Hadiprajitno (2013), teori agensi membahas masalah keagenan yang timbul karena adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. *Principal* adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan, sedangkan *agent* adalah manajemen yang ditunjuk pemilik untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan mengelola harta pemilik. *Agent* dan *principal* diasumsikan memiliki kepentingan yang berbeda. Pemilik perusahaan menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan, sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Sutedi, 2011 dalam Darabali dan Saitri, 2016). Perbedaan kepentingan tersebut mendorong masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tujuan dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang diinginkan.

Eisenhardt (1989) dalam Sadih dan Priyadi (2015) menyatakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*);
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persentase masa mendatang (*bounded rationally*); dan
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk adverse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer akan cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya (*self interest*). Jensen dan Meckling (1976)

dalam Siahaan (2013) menyatakan bahwa jika *agent* berusaha untuk memaksimalkan keperluan dan juga memiliki motivasi serta keinginan yang berbeda, akan muncul alasan untuk mempercayai bahwa *agent* (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Tindakan oportunistik manajer tersebut akan mendorong terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Konflik kepentingan dapat disebabkan oleh asimetri informasi. Menurut Darabali dan Saitri (2016), manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik, mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebut sebagai asimetri informasi. Menurut Scott (2015), terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya lebih mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan daripada pihak luar.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman.

Konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* cenderung memicu terjadinya *agency cost* (biaya keagenan). Menurut Godfrey *et al.* (2010), *agency cost* secara umum meliputi jumlah uang yang setara dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami *principal* akibat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Godfrey *et al.* (2010) menyatakan bahwa terdapat 3 jenis *agency cost*, yaitu:

1. *Monitoring cost*

Merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku manajer dalam mengelola perusahaan. Contoh *monitoring cost* adalah biaya audit dan biaya kompensasi manajemen.

2. *Bonding cost*

Merupakan suatu biaya pengikatan untuk membuat mekanisme yang menjamin bahwa manajer akan bertindak sesuai kepentingan pemilik atau menjamin bahwa manajer akan memberikan kompensasi kepada pemilik jika manajer tidak bertindak sesuai kepentingan pemilik. *Bonding cost* dapat ditanggung oleh manajer, misalnya biaya untuk menerbitkan laporan keuangan triwulan secara sukarela.

3. *Residual loss*

Merupakan penurunan tingkat kesejahteraan bagi pemilik yang terjadi meskipun pemilik dan manajer telah menanggung *monitoring cost* dan *bonding cost*. Contoh *residual loss* adalah manajer dapat mengubah akun dalam laporan keuangan untuk memaksimalkan bonus tanpa meningkatkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya sesuai kepentingan pemilik.

Konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat membuat *agent* melakukan tindakan oportunistik dengan mempengaruhi angka laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalimunthe dan Purwanto (2015) menjelaskan bahwa manajer yang berkepentingan untuk memperoleh kompensasi akan berusaha menampilkan angka laba yang sesuai dengan keinginan pemegang saham. Manajer

melakukan ini karena penilaian kinerja mereka didasarkan pada kepuasan pemegang saham terhadap laba yang diperoleh dan alokasi pembagian dividen. Tindakan tersebut menyebabkan laba yang disajikan tidak menggambarkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya, sehingga mempengaruhi kualitas laba.

2.3 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) dikemukakan oleh Ross. L. Watts dan Jerold L. Zimmerman pada tahun 1978. Menurut Scott (2015), *positive accounting theory is concerned with predicting such actions as the choices of accounting policies by firm managers and how managers will respond to proposed new accounting standards*, yang artinya teori akuntansi positif menyangkut prediksi tindakan yang dilakukan manajer perusahaan, seperti pemilihan kebijakan akuntansi dan bagaimana manajer menanggapi standar akuntansi baru yang diajukan. Standar akuntansi yang berlaku memberikan beberapa pilihan kebijakan akuntansi kepada manajemen perusahaan. Misalnya, manajemen perusahaan dapat memilih metode penilaian persediaan antara *FIFO* atau *weighted average*.

Menurut Scott (2015), fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi memberikan kesempatan manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, yaitu memilih kebijakan akuntansi sesuai kepentingan pribadi manajemen. Teori akuntansi positif mengasumsikan manajer akan bertindak rasional dan memilih kebijakan akuntansi yang terbaik bagi kepentingan mereka jika hal tersebut dapat dilakukan. Prediksi yang dijelaskan dalam teori akuntansi positif terdiri dari 3 hipotesis, yaitu:

1. *The bonus plan hypothesis*

Manajer dengan perjanjian bonus atau kompensasi manajerial cenderung memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. Manajer menginginkan remunerasi (imbalan) yang tinggi, sehingga jika bonus diberikan berdasarkan laba perusahaan, maka manajer akan berusaha meningkatkan bonus periode berjalan dengan meningkatkan laba. Salah satu caranya adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba tahun berjalan. Walaupun hal ini akan menyebabkan laba di periode mendatang menurun sebagai konsekuensi proses akrual, nilai *present value* dari jumlah bonus yang diperoleh manajer akan lebih tinggi jika bonus diperoleh pada periode berjalan.

2. *The debt covenant hypothesis*

Semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang (*debt covenant*), manajer perusahaan akan semakin terdorong memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. Hal ini akan menurunkan kemungkinan perusahaan mengalami *technical default*, yaitu kegagalan perusahaan memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian utang yang bukan berasal dari keterlambatan pembayaran. Misalnya, perusahaan harus mempertahankan tingkat *interest coverage* (kemampuan membayar beban bunga), *debt-to-equity*, *working capital*, dan/atau ekuitas pemegang saham. Konsekuensi pelanggaran perjanjian utang dapat berupa pembatasan pembagian dividen atau utang tambahan. Untuk menghindari

atau menunda pelanggaran, manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan.

3. *The political cost hypothesis*

Semakin besar biaya politik yang ditanggung perusahaan, maka manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang menunda pengakuan laba periode berjalan atau menurunkan laba periode berjalan. Biaya politik dapat dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan yang tinggi, sehingga menarik perhatian media dan konsumen. Pemerintah juga dapat mengenakan regulasi pajak dan peraturan lainnya terhadap perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan perusahaan berukuran besar dengan profitabilitas yang tinggi memiliki biaya politik yang lebih besar.

Ketiga hipotesis tersebut menunjukkan manajemen perusahaan dapat terdorong untuk memanfaatkan keleluasaan yang dimiliki dalam memilih kebijakan akuntansi. Pemilihan kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan kepentingan manajemen berdampak pada berubahnya angka laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini akan menyebabkan laba yang dilaporkan tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya dan mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan.

2.4 Kualitas Laba

Salah satu informasi penting yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi laba perusahaan. Menurut Kasmir (2016), laba atau rugi merupakan selisih antara jumlah pendapatan dan biaya, dimana laba diakui ketika jumlah

pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, sedangkan rugi diakui ketika jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2016) menyatakan bahwa laba seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran lain seperti imbal hasil investasi (*return on investment*) atau laba per saham (*earnings per share*). Menurut Sadih dan Priyadi (2015), laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pengguna laporan keuangan, karena angka laba dapat digunakan untuk merepresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan bermakna baik secara intuitif maupun ekonomik bagi para pengguna laporan keuangan. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 1 (FASB, 2008)* menyatakan bahwa fokus utama dari laporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang diukur dari laba perusahaan dan komponen-komponennya. Investor dan kreditor memerlukan laporan laba untuk menentukan apakah mereka akan melakukan investasi atau memberikan pinjaman utang kepada perusahaan tersebut. Menurut Siahaan (2013), baik investor maupun kreditor menggunakan informasi laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, mengestimasi *earning power*, dan memprediksi laba di masa mendatang. Selain itu, laba juga digunakan untuk memperkirakan keberlangsungan perusahaan di masa mendatang (Simamora *et al.*, 2014).

Pentingnya informasi laba bagi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan menunjukkan informasi laba yang disampaikan harus berkualitas. Laba yang berkualitas tinggi akan mendukung pengambilan keputusan, sedangkan laba yang berkualitas rendah tidak mendukung pengambilan keputusan. Menurut Warianto dan Rusiti (2014), laba dapat dikatakan berkualitas tinggi jika laba yang

dilaporkan tersebut dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan yang terbaik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sebaliknya, kualitas laba perusahaan yang rendah tidak akan dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Simamora *et al.*, 2014). Robinson *et al.* (2015) mengatakan bahwa laba dengan kualitas yang rendah menunjukkan informasi laba yang diberikan tidak memberikan indikasi yang berguna mengenai kinerja perusahaan. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan (Sukmawati *et al.*, 2014).

Menurut Subramanyam (2014), *earnings quality refers to the relevance of earnings in measuring company performance*, yang artinya kualitas laba merujuk pada relevansi laba dalam mengukur kinerja perusahaan. Kualitas laba adalah laba yang mencerminkan kondisi sesungguhnya dan tidak menyesatkan pengguna (Ummah dan Subroto, 2013). Kualitas laba perusahaan dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam melaporkan laba perusahaan yang sebenarnya, dengan sebaik mungkin melaporkan laba yang akan digunakan untuk memprediksi laba masa depan perusahaan (Yushita *et al.*, 2013). Menurut Dechow *et al.* (2010) dalam Sadih dan Priyadi (2015), ada 3 hal yang harus diketahui mengenai kualitas laba, yaitu: (1) kualitas laba tergantung pada informasi yang relevan dalam membuat keputusan; (2) kualitas dari angka laba yang dilaporkan dilihat dari apakah informasi tersebut menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan; dan (3) kualitas laba secara bersama-sama ditentukan oleh relevansi dari kinerja keuangan yang mendasari keputusan.

Terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan dalam mengukur kualitas laba. Dechow *et al.* (2010) dalam Romasari (2013) mengklasifikasikan proksi kualitas laba ke dalam tiga kategori utama, yaitu sifat laba (*properties of earnings*), respon investor terhadap laba (*investor responsiveness to earning*), dan indikator eksternal dari salah saji laba (*external indicators of earnings misstatement*). Kategori pertama yaitu sifat laba, terdiri dari persistensi laba, akrual abnormal, perataan laba, dan ketepatan pengakuan rugi. Kategori kedua yaitu respon investor terhadap laba diproksikan dengan *earnings response coefficient (ERC)*. Kategori ketiga yaitu indikator eksternal dari salah saji laba, terdiri dari *Accounting and Auditing Enforcement Releases (AAERs)*, pernyataan kembali, dan ketidakefisienan prosedur *internal control* berdasarkan *Sarbanes Oxley Act (SOX)*. Penelitian ini menggunakan akrual abnormal, yaitu *modified Jones discretionary accruals* sebagai proksi kualitas laba. *Modified Jones discretionary accruals* diperkenalkan oleh Patricia M. Dechow dan Richard G. Sloan pada tahun 1995 sebagai modifikasi dari rumus yang sebelumnya digunakan oleh Jennifer J. Jones pada tahun 1991.

Discretionary accruals merupakan bagian dari akrual dalam laba perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh diskresi atau keleluasaan yang dimiliki manajemen. Dengan kata lain, manajemen dapat memanipulasi komponen akrual sehingga laba yang disajikan tidak menunjukkan laba yang sesungguhnya. Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa akrual merupakan komponen yang mudah untuk dimanipulasi sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena komponen akrual tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya memanipulasi besar

kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, dasar akrual merupakan prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan sehingga akrual pasti selalu ada dalam laporan keuangan. Weygandt *et al.* (2015) menyatakan bahwa dasar akrual merupakan basis dimana perusahaan mencatat transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan pada periode saat transaksi tersebut terjadi. Menurut Robinson *et al.* (2015), penggunaan basis akrual menyebabkan manajer harus melibatkan banyak *judgment* dan estimasi, yang dapat dimanfaatkan manajer untuk melakukan manipulasi laba.

Akrual terdiri dari 2 komponen, yaitu *non-discretionary accruals* dan *discretionary accruals*. Menurut Sulistyanto (2008), *non-discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan, *discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Contoh *discretionary accruals* adalah penilaian estimasi piutang tak tertagih, pengakuan biaya garansi, pengakuan liabilitas kontijensi, dan lain-lain. Untuk memperoleh nilai *discretionary accruals*, *total accruals* (jumlah keseluruhan akrual) harus terlebih dahulu dihitung, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai *non-discretionary accruals* berdasarkan rumus *modified Jones*. *Total accruals* didefinisikan Scott (2015) sebagai selisih antara laba bersih (*net income*) dengan arus kas operasi (*operating cash flow*). Berikut ini adalah rumus untuk mencari *total accruals (TACC)* (Darabali dan Saitri, 2016):

$$TACC_{it} = NI_{it} - OCF_{it}$$

Keterangan:

$TACC_{it}$ = Total accruals perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada tahun t

OCF_{it} = Arus kas dari aktivitas operasi (*operating cash flow*) perusahaan i pada tahun t

Menurut Kasmir (2016), laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak. Arus kas operasi merupakan arus kas masuk dan keluar dari kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (Nany, 2013).

Nilai *total accruals* kemudian diestimasi menggunakan persamaan regresi *ordinary least square (OLS)*. Menurut Ghozali (2016), metode *OLS* mengestimasi suatu regresi dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Berikut ini adalah persamaan regresi *total accruals* (Darabali dan Saitri, 2016):

$$\frac{TACC_{it}}{TA_{i,t-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{i,t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{i,t-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$TACC_{it}$ = Total accruals perusahaan i pada tahun t

$TA_{i,t-1}$ = Total assets perusahaan i pada akhir tahun t-1

ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan (*revenue*) perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang bersih (*net receivable*) perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_{it} = *Gross property, plant, and equipment* (aset tetap) perusahaan i pada tahun t

ε_{it} = *Error* yang terjadi pada perusahaan i pada tahun t

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2016) mendefinisikan aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Menurut Kieso *et al.* (2014), pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari aktivitas yang umumnya dilakukan perusahaan dan dapat berupa penjualan, komisi, bunga, dividen, dan penerimaan sewa. Menurut Weygandt *et al.* (2015), piutang merujuk pada klaim atas jumlah yang terutang dari individu atau perusahaan, yang diharapkan akan dilunasi dalam bentuk kas. Robinson *et al.* (2015) mendefinisikan *property, plant, and equipment* sebagai aset berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi selama lebih dari satu periode.

Nilai *non-discretionary accruals* (*NDACC*) dihitung berdasarkan nilai α_1 , α_2 , dan α_3 yang telah diperoleh dari persamaan regresi *total accruals*. Berikut ini adalah cara menghitung *non-discretionary accruals* (Darabali dan Saitri, 2016):

$$NDACC_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{i,t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Keterangan:

$NDACC_{it}$ = *Non-discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

$TA_{i,t-1}$ = *Total assets* perusahaan i pada akhir tahun t-1

ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan (*revenue*) perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang bersih (*net receivable*) perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_{it} = *Gross property, plant, and equipment* (aset tetap) perusahaan i pada tahun t

Nilai *discretionary accruals* ($DACC$) dihitung dari *total accruals* dikurangi dengan *non-discretionary accruals* yang telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Berikut ini adalah cara menghitung *discretionary accruals* (Darabali dan Saitri, 2016):

$$DACC_{it} = \left(\frac{TACC_{it}}{TA_{i,t-1}} \right) - NDACC_{it}$$

Keterangan:

$DACC_{it}$ = *Discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

$TACC_{it}$ = *Total accruals* perusahaan i pada tahun t

$TA_{i,t-1}$ = *Total assets* perusahaan i pada akhir tahun t-1

$NDACC_{it}$ = *Non-discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

Ketika nilai *non-discretionary accruals* lebih besar daripada *total accruals*, akrual lebih banyak berasal dari aktivitas bisnis yang terjadi secara normal.

Sedangkan, ketika nilai *non-discretionary accruals* lebih kecil daripada *total accruals*, akrual lebih banyak berasal dari diskresi manajemen (*discretionary accruals*). Menurut Robinson *et al.* (2015), nilai *discretionary accruals* yang terlalu tinggi merupakan indikator bahwa laba dimanipulasi, sehingga kualitas labanya rendah. Sebaliknya, laba yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan yang terjadi secara normal mampu memberikan informasi yang relevan dan merepresentasikan informasi yang tepat atas kinerja perusahaan sesungguhnya, sehingga kualitas labanya tinggi.

2.5 Leverage

Leverage mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban dalam jangka panjang. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur sampai sejauh mana aset dibiayai oleh utang (Arifin dan Destriana, 2016). Perusahaan dengan *leverage* tinggi mengindikasikan bahwa utang lebih banyak digunakan dalam struktur modalnya (Darabali dan Saitri, 2016). Menurut Subramanyam (2014), utang harus dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan tanpa melihat kondisi keuangan perusahaan dan kebanyakan utang memiliki beban bunga yang harus dibayarkan secara berkala. Semakin tinggi utang yang digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan, maka semakin besar nilai utang beserta bunga yang harus dibayarkan dalam periode yang disepakati.

Perusahaan yang memiliki utang tinggi dapat berdampak pada risiko keuangan yang semakin besar, yaitu kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya (Warianto dan Rusiti, 2014). Risiko ini terkait dengan

komitmen yang mengikat perusahaan untuk membayar utang dan bunganya. Menurut Subramanyam (2014), kegagalan perusahaan untuk membayar utang beserta bunganya dapat mengakibatkan pemegang saham kehilangan kendali dan seluruh bagian investasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya kreditor yang memiliki risiko atas gagal bayar, namun pemegang saham sebagai pemilik perusahaan juga berpotensi menanggung risiko walau hanya sebatas pada bagian investasinya.

Untuk melindungi kepentingan kreditor, perusahaan dapat disyaratkan untuk menyetujui *debt covenant*, yang berisi pembatasan aksi yang dilakukan perusahaan selama jangka waktu perjanjian utang atau syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan. Perjanjian ini dimaksudkan bagi kreditor untuk mengontrol kinerja perusahaan (Ummah dan Subroto, 2013). Robinson *et al.* (2015) menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap *debt covenant* dapat mengakibatkan kreditor menuntut perusahaan, memberikan denda atau tingkat bunga yang lebih tinggi, renegotiasi perjanjian utang, atau meminta pelunasan utang. Hal ini menunjukkan jika perusahaan melanggar *debt covenant*, konsekuensi berupa biaya yang akan dikeluarkan perusahaan akan lebih besar dibandingkan jika perusahaan tidak melanggar *debt covenant*. Menurut Godfrey *et al.* (2010), *debt covenant* umumnya meliputi salah satu atau beberapa jenis perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian yang membatasi kesempatan produksi dan investasi perusahaan.
2. Perjanjian yang mencegah pembayaran dividen kepada pemegang saham.
3. Perjanjian yang membatasi kebijakan pendanaan perusahaan.

4. Perjanjian yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pemberi dana, misalnya laporan keuangan dan pengungkapan kepada pihak berwenang.

Manajemen perusahaan akan berusaha untuk tidak melanggar *debt covenant*, sesuai dengan *debt covenant hypothesis* yang terdapat dalam teori akuntansi positif. Hal ini dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan oportunistik, yaitu dengan memanfaatkan diskresi yang dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk informasi laba. Watts dan Zimmerman (1986) dalam Yamaditya dan Raharja (2014) menyatakan bahwa teori keagenan menjelaskan semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang yang berbasis akuntansi, lebih memungkinkan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan pada periode masa mendatang ke periode saat ini, karena laba bersih yang dilaporkan naik akan mengurangi kemungkinan kegagalan pembayaran utang-utang pada masa depan. Menurut Ghosh dan Moon (2010) dalam Warianto dan Rusiti (2014), jika tingkat *leverage* suatu perusahaan tinggi maka akan memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba yang besar sehingga kualitas laba yang dihasilkan rendah. Sadih dan Priyadi (2015) juga menyatakan apabila perusahaan mempunyai tingkat utang yang tinggi akan berdampak pada risiko keuangan yang tinggi dan tidak mampu membayar utang, mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak biaya, sehingga manajemen cenderung melakukan manajemen laba dan laba yang dihasilkan berkualitas rendah.

Namun, Soly dan Wijaya (2017) mengemukakan bahwa perusahaan dengan utang yang tinggi, terutama utang jangka panjang mendapatkan pengawasan ketat dari pihak kreditor. Kreditor mengharapkan perusahaan (debitor) melakukan pembayaran bunga dan pokok utang dengan lancar, serta mencegah perusahaan melanggar perjanjian utang, sehingga kreditor akan mengevaluasi kinerja perusahaan dengan seksama. Hal ini menyebabkan kualitas laba yang lebih baik pada perusahaan dengan utang jangka panjang yang tinggi.

Leverage dapat diproksikan dengan *debt to total assets ratio (DTA)*, yang membandingkan total utang dengan total aset. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ummah dan Subroto (2013) bahwa *leverage* dapat dihitung melalui rasio utang terhadap aset. *Debt to total assets ratio* mengukur persentase total aset yang dibiayai dengan utang (Robinson *et al.*, 2015). Kieso *et al.* (2014) menyatakan bahwa *debt to total assets ratio (DTA)* dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Total Asset ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

Total Debt = Total utang perusahaan

Total Assets = Total aset perusahaan

Menurut Kieso *et al.* (2014), liabilitas atau utang adalah kewajiban perusahaan pada masa sekarang yang timbul dari kejadian di masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan berasal dari arus keluar sumber daya perusahaan yang memiliki manfaat ekonomi. Liabilitas dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo dalam periode satu tahun atau siklus operasi, serta

liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun atau siklus operasi. Sedangkan, aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai hasil dari peristiwa di masa lalu dimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. Aset dikelompokkan menjadi aset lancar yang terdiri dari kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi kas dalam periode satu tahun atau siklus operasi, serta aset tidak lancar yang tidak memenuhi klasifikasi aset lancar.

Hasil penelitian Warianto dan Rusiti (2014) serta Sukmawati *et al.* (2014) menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap kualitas laba. Penelitian Ummah dan Subroto (2013) menunjukkan bahwa pada tingkat utang yang tinggi, *DTA* berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, sedangkan pada tingkat utang yang rendah, *DTA* berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Namun, penelitian yang dilakukan Sadiyah dan Priyadi (2015) serta Darabali dan Saitri (2016) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap kualitas laba dinyatakan sebagai berikut:

Ha₁: *Leverage* berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.6 Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki (Sukmawati *et al.*, 2014). Menurut Subramanyam (2014), likuiditas adalah kemampuan untuk mengkonversi aset menjadi kas atau untuk menyediakan kas yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas atau sering disebut juga dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang mengukur seberapa likuidnya suatu

perusahaan (Kasmir, 2016). Semakin tinggi kemampuan aset lancar perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek menunjukkan kondisi perusahaan yang likuid, sedangkan kondisi yang sebaliknya mengindikasikan kondisi perusahaan yang tidak likuid (ilikuid).

Menurut Sadiyah dan Priyadi (2015), likuiditas merupakan salah satu indikator untuk menilai suatu perusahaan memiliki masalah dalam memperoleh sumber aliran kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hassan dan Farouk (2014) menyatakan bahwa likuiditas merupakan indikasi bagi pemerintah, investor, calon investor, dan *stakeholder* lainnya mengenai kemampuan perusahaan untuk bertahan di masa mendatang tanpa mengalami masalah keuangan. Menurut Subramanyam (2014), perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah membuat perusahaan tidak dapat mengambil kesempatan memperoleh potongan harga atau kesempatan menguntungkan lainnya. Permasalahan likuiditas yang lebih ekstrem menunjukkan ketidakmampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek, sehingga dapat memaksa perusahaan menjual investasi atau aset lainnya dengan harga yang murah, bahkan mengalami kebangkrutan. Bagi pemegang saham perusahaan, likuiditas yang rendah dapat mengindikasikan hilangnya kontrol atau mengalami kerugian investasi jika tingkat likuiditas rendah. Bagi kreditor, likuiditas yang rendah dapat mengakibatkan perusahaan terlambat melunasi bunga dan pokok utang, atau bahkan gagal bayar. Oleh karena itu, pengukuran likuiditas perusahaan merupakan salah satu analisis terpenting karena perusahaan yang gagal melunasi utang jangka pendek akan diragukan kelangsungan usahanya.

Besarnya konsekuensi yang dapat dihadapi perusahaan jika mengalami gagal bayar dan kesulitan keuangan mendorong manajer menghindari tingkat likuiditas yang rendah. Salah satu tindakan oportunistik yang dapat dilakukan manajer perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah adalah memanfaatkan diskresi dalam menyusun laporan keuangan, termasuk informasi laba. Hal ini menyebabkan laba tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya, sehingga kualitas labanya rendah. Sedangkan, perusahaan yang memiliki kemampuan dalam membayar utang jangka pendeknya berarti perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik dalam pemenuhan utang lancarnya, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan manajemen laba (Warianto dan Rusiti, 2014).

Tingkat likuiditas dapat diukur menggunakan *current ratio*. Menurut Weygandt *et al.* (2015), *current ratio* adalah salah satu rasio yang paling sering digunakan untuk mengukur likuiditas dan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Menurut Subramanyam (2014), *current ratio* umum digunakan untuk mengukur likuiditas karena kemampuannya dalam mengukur:

1. *Current liability coverage*

Semakin tinggi jumlah aset lancar dari jumlah kewajiban jangka pendek, maka semakin besar jaminan bahwa kewajiban jangka pendek akan dibayar.

2. *Buffer against losses*

Semakin besar kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, semakin rendah risiko yang ditanggung perusahaan. *Current ratio* menunjukkan *margin of safety* yang tersedia untuk menutupi penyusutan nilai aset lancar non kas pada saat membuang atau melikuidasi aset lancar tersebut.

3. *Reserve of liquid funds*

Current ratio relevan sebagai ukuran *margin of safety* terhadap ketidakpastian dan guncangan yang dapat mengganggu arus kas perusahaan secara tidak terduga.

Menurut Kasmir (2016), perhitungan *current ratio* dilakukan dengan membandingkan total aset lancar dengan total utang lancar. Menurut Subramanyam (2014), patokan *current ratio* yang umum digunakan adalah 2:1 atau lebih. Perusahaan dengan *current ratio* di bawah 2:1 memiliki risiko likuiditas yang lebih tinggi. Namun, *current ratio* yang jauh melebihi 2:1 mengindikasikan sumber daya tidak digunakan secara efektif. Rumus untuk menghitung *current ratio* (*CR*) adalah (Weygandt *et al.*, 2015):

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Keterangan:

Current Assets = Total aset lancar perusahaan

Current Liabilities = Total utang jangka pendek perusahaan

Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang perusahaan harapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan dalam waktu satu tahun atau selama siklus operasi perusahaan (Kieso *et al.*, 2014). Kewajiban atau utang jangka pendek adalah utang yang perusahaan perkirakan akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus operasional perusahaan, tergantung mana yang lebih lama (Weygandt *et al.*, 2015).

Penelitian Warianto dan Rusiti (2014) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Penelitian yang dilakukan Sukmawati *et al.* (2014) serta Ananda dan Ningsih (2016) juga menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Sadih dan Priyadi (2015), Yushita *et al.* (2013), serta Soly dan Wijaya (2017) menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap kualitas laba dinyatakan sebagai berikut:

Ha₂: Likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki perusahaan (Darabali dan Saitri, 2016). Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas (Warianto dan Rusiti, 2014). Menurut Ananda dan Ningsih (2016), semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan pada total aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta total penjualan tahunan perusahaan. Terdapat 4 kategori ukuran perusahaan, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Klasifikasi tersebut bukan klasifikasi yang khusus digunakan untuk mengelompokkan ukuran perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia, karena

berlaku untuk seluruh jenis perusahaan di Indonesia. Tabel 2.1 menunjukkan kriteria untuk masing-masing ukuran perusahaan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

Ukuran Perusahaan	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	≤ Rp 50 juta	≤ Rp 300 juta
Usaha Kecil	> Rp 50 juta - Rp 500 juta	> Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	> Rp 500 juta - Rp 10 miliar	> Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	> Rp 10 miliar	> Rp 50 miliar

(Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008)

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah (Ananda dan Ningsih, 2016). Dengan menghasilkan laba yang lebih besar, perusahaan besar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan operasionalnya, sehingga kelangsungan usahanya lebih terjaga. Menurut Sukmawati *et al.* (2014), semakin besar perusahaan maka semakin tinggi pula kelangsungan usaha suatu perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan praktik manipulasi laba. Sadih dan Priyadi (2015) juga berpendapat bahwa perusahaan yang berukuran besar biasanya lebih diperhatikan oleh masyarakat, sehingga mereka harus lebih berhati-hati dalam melaporkan informasi laba dan harus melaporkan kondisi kinerja keuangannya lebih akurat. Llukani (2013) menyatakan tiga alasan yang mendorong perusahaan besar tidak melakukan manajemen laba sehingga kualitas labanya tinggi. Pertama, laporan keuangan perusahaan besar umumnya diaudit oleh kantor akuntan publik besar sehingga dapat mencegah manipulasi laba yang mendistorsi informasi keuangan. Kedua, perusahaan besar memiliki reputasi yang lebih baik

dibandingkan perusahaan kecil, menyebabkan biaya atas hilangnya reputasi perusahaan akan lebih besar sehingga mengurangi inisiatif melakukan manajemen laba. Ketiga, kebanyakan perusahaan besar memiliki audit internal yang terstruktur dan terpadu sehingga mengurangi inisiatif manajer melakukan manajemen laba. Manajer perusahaan besar diasumsikan tidak menggunakan banyak diskresi untuk memanipulasi laba, sehingga menyebabkan kualitas laba meningkat.

Namun, Llukani (2013) juga menyampaikan persepsi yang berbeda, yaitu perusahaan besar dapat dipandang cenderung memanfaatkan diskresi manajemen untuk mengatur laba. Perusahaan besar umumnya memiliki hubungan yang baik dengan auditor karena merupakan klien dengan reputasi baik, sehingga dapat bernegosiasi dengan auditor dan membuat proses audit lebih fleksibel. Selain itu, sesuai dengan *political cost hypothesis*, perusahaan besar cenderung menurunkan laba untuk menghindari pajak yang besar atau menghindari regulasi tertentu. Di sisi lain, perusahaan besar membutuhkan pendanaan yang besar sehingga dapat berupaya meningkatkan labanya untuk mempermudah perolehan pendanaan eksternal.

Penelitian ini memproksikan ukuran perusahaan dengan *logaritma natural* (\ln) total aset. Menurut Anggraeni dan Hadiprajitno (2013), nilai total aset yang mencapai miliar bahkan triliun dapat disederhanakan menggunakan *logaritma natural* sehingga mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai asal yang sebenarnya. Menurut Warianto dan Rusiti (2014), ukuran perusahaan (*SIZE*) dapat diukur dengan rumus:

$$Size = \ln Total Asset$$

Menurut Weygandt *et al.* (2015), aset sebagai sumber daya yang dimiliki suatu bisnis yang dipakai untuk melakukan aktivitas produksi dan penjualan barang dan/atau jasa. Karakteristik umum aset adalah mampu memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Menurut Schroeder *et al.* (2014), aset dapat terbagi menjadi 5 kategori, yaitu:

1. *Current assets* (aset lancar)

Merupakan aset yang dapat dikonversi menjadi kas, dapat terjual atau dikonsumsi selama siklus operasional normal atau 1 tahun.

2. *Investments* (investasi)

Terdiri dari sekuritas yang dibeli untuk tujuan tertentu, aset yang sedang tidak digunakan, dan dana yang khusus akan digunakan di masa depan untuk tujuan tertentu.

3. *Property, plant, and equipment* (aset tetap)

Aset tetap berwujud memiliki substansi fisik, termasuk tanah, yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun.

4. *Intangible assets* (aset tak berwujud)

Tidak memiliki substansi fisik, namun prosedur penilaiannya mirip dengan aset tetap berwujud.

5. *Other assets* (aset lainnya)

Contohnya adalah aset tetap berwujud yang dimiliki untuk dijual atau piutang jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan Warianto dan Rusiti (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasil penelitian yang

dilakukan Sadih dan Priyadi (2015), Ananda dan Ningih (2016), serta Pertiwi *et al.* (2017) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. Sedangkan, hasil penelitian Sukmawati *et al.* (2014), Darabali dan Saitri (2016), serta Soly dan Wijaya (2017) tidak berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas laba dinyatakan sebagai berikut:

Ha₃: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.8 *Investment Opportunity Set*

Investasi merupakan sejumlah dana atau sumber lainnya yang dikumpulkan saat ini untuk memperoleh keuntungan pada masa depan (Fidhayatin dan Dewi, 2012). Menurut Myers (1997) dalam Marinda *et al.* (2014), *investment opportunity set (IOS)* merupakan keputusan investasi dalam bentuk kombinasi antara aset yang dimiliki (*asset in place*) dan pilihan investasi yang akan datang dengan *net present value (NPV)* positif. *IOS* merupakan nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran yang ditetapkan oleh manajemen pada masa yang akan datang, dan merupakan investasi yang diharapkan untuk mendapatkan *return* yang lebih besar (Darabali dan Saitri, 2016).

Menurut Nika dan Mahaputra (2012), konsep *IOS* berawal dari adanya suatu kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang, namun seringkali perusahaan tidak dapat memanfaatkan semua kesempatan investasi di masa yang akan datang. Perusahaan yang tidak menggunakan kesempatan investasi tersebut akan memiliki

pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesempatan investasi yang hilang. Dalam hal ini, *IOS* berperan untuk memberikan gambaran tentang luasnya kesempatan atau pilihan pengeluaran untuk kepentingan di masa yang akan datang. *IOS* mengaplikasikan nilai aset dan nilai kesempatan perusahaan untuk tumbuh di masa mendatang, yang ditunjukkan dengan nilai *net present value (NPV)* positif. Ross *et al.* (2016) mendefinisikan *net present value (NPV)* sebagai perbedaan antara nilai pasar investasi dengan biayanya. Jika selisih keduanya positif (*NPV* positif), maka investasi layak dilakukan. Pilihan investasi yang dimiliki perusahaan tidak hanya pada proyek-proyek yang didanai dari kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan, namun juga kemampuan mengeksploitasi kesempatan memperoleh keuntungan (Marinda *et al.*, 2014)

Besarnya *IOS* tergantung dari pengeluaran-pengeluaran yang ditentukan oleh manajemen di masa depan yang diharapkan menghasilkan pengembalian yang tinggi (Puteri dan Rohman, 2012). Menurut Warianto dan Rusiti (2014), tindakan manajer menjadi *unobservable* (tidak dapat diamati) yang dapat menyebabkan prinsipal (pemilik perusahaan) tidak dapat mengetahui apakah manajer telah melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan prinsipal atau tidak. Perusahaan yang memiliki kesempatan bertumbuh atau *IOS* yang tinggi diharapkan menghasilkan *return* yang tinggi pula.

Manajer dapat melakukan tindakan oportunistik untuk memenuhi ekspektasi investor, analis, maupun pihak-pihak lainnya. Menurut Raoli (2013), manajemen perusahaan mengetahui bahwa pasar akan bereaksi negatif jika perusahaan tidak mencapai perkiraan analis. Manajer yang dapat memenuhi atau

melebihi ekspektasi analis akan menerima bonus dan direspons positif oleh pasar. Salah satu cara yang umum digunakan manajer untuk memenuhi ekspektasi tersebut secara terus-menerus adalah dengan memanipulasi angka dalam laporan keuangan. Hal ini menyebabkan laba yang dilaporkan lebih tinggi dan tidak menggambarkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya, sehingga kualitas labanya rendah. Menurut Francis dan Schipper (1999) dalam Yuliana dan Trisnawati (2015), jika perusahaan laba, akun saldo laba ditahan akan naik sehingga otomatis nilai buku ekuitas juga naik. Kenaikan nilai buku ekuitas menunjukkan peningkatan nilai buku perusahaan. Idealnya, kenaikan nilai tersebut diikuti dengan peningkatan harga pasar sahamnya.

IOS tidak dapat diobservasi secara langsung sehingga memerlukan proksi dalam perhitungannya (Nika dan Mahaputra, 2012). Menurut Marinda *et al.* (2014), proksi *IOS* yang digunakan peneliti secara umum diklasifikasikan menjadi tiga proksi. Pertama, proksi berdasarkan harga, yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Kedua, proksi berdasarkan investasi, yang mengungkapkan bahwa suatu kegiatan investasi yang besar memiliki hubungan positif dengan nilai *IOS* perusahaan. Ketiga, proksi berdasarkan varian, yang menyatakan suatu opsi akan lebih bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh.

Penelitian ini menggunakan proksi *market to book value of asset ratio* (*MBVA*) untuk mengukur variabel independen *IOS*. Proksi *MBVA* adalah salah satu proksi berbasis harga. Menurut Myers (1997) dalam Marinda *et al.* (2014), proksi

MBVA didasarkan dengan pemikiran bahwa prospek pertumbuhan perusahaan terefleksi dalam harga saham, pasar menilai perusahaan yang sedang bertumbuh memiliki nilai aset yang lebih besar dari nilai bukunya. Rumus untuk menghitung *market to book value of asset ratio (MBVA)* adalah (Darabali dan Saitri, 2016):

$$MBVA = \frac{TA - TE + (Outstanding\ shares \times Closing\ price)}{TA}$$

Keterangan:

MBVA = *Market to book value of assets ratio*

TA = Total aset perusahaan

TE = Total ekuitas perusahaan

Outstanding shares = Jumlah lembar saham perusahaan yang beredar

Closing price = Harga penutupan harian saham perusahaan

Menurut Hery (2014), aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan (dimanfaatkan atau dikonsumsi) oleh perusahaan demi lancarnya kegiatan operasional sehari-hari. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan yang tersisa setelah dikurangi seluruh liabilitas perusahaan (Kieso *et al.*, 2014). Jumlah saham yang beredar (*outstanding shares*) adalah jumlah lembar saham yang telah diotorisasi, diterbitkan, dan dimiliki oleh pemegang saham (Hery, 2014). Menurut Manurung (2013), harga penutupan harian adalah harga transaksi saham yang terjadi terakhir pada hari itu dan menjadi patokan harga saham pada hari yang bersangkutan.

Hasil penelitian Warianto dan Rusiti (2014) menunjukkan bahwa *IOS* berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh

penelitian Puteri dan Rohman (2012), Siahaan (2013), serta Sadih dan Priyadi (2015) yang menyatakan bahwa *IOS* berpengaruh terhadap kualitas laba. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Simamora *et al.* (2014) serta Darabali dan Saitri (2016) tidak berhasil membuktikan bahwa *IOS* berpengaruh terhadap kualitas laba. Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh *investment opportunity set* terhadap kualitas laba dinyatakan sebagai berikut:

Ha₄: *Investment opportunity set* berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.9 Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 mengatur persyaratan keanggotaan komite audit sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali komisaris independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
9. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum,

saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* [KNKG] (2006), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik;
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholder*, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada konflik

kepentingan (Wijayanti dan Yuliani, 2013). Menurut Dwiharyadi (2017), komite audit memiliki peran pengawasan yang merupakan refleksi dari prinsip teori keagenan bahwa perusahaan membutuhkan suatu mekanisme pengawasan terhadap perilaku oportunistik manajer. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit sangat dibutuhkan oleh pemilik perusahaan karena mereka tidak dapat mengawasi dan mengamati secara langsung kualitas informasi perusahaan (Dalimunthe dan Purwanto, 2015). *Blue Ribbon Committee* (1999) dalam Dwiharyadi (2017) menyatakan bahwa komite audit merupakan “*the ultimate monitor*” atau pengawas utama dari proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan anggota komite audit dengan jumlah yang memadai agar dapat menjalankan pengawasan yang efektif.

Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2016). Menurut Sawyer *et al.* (2003) dalam Kosasih dan Widayati (2013), ukuran komite audit sebaiknya ditentukan berdasarkan ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan tersebut. Semakin banyak jumlah anggota komite audit akan meningkatkan sumber daya dan kemampuan komite audit untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam proses pengawasan pelaporan keuangan. Pengawasan yang dilakukan komite audit dalam perusahaan diharapkan dapat mencegah perilaku menyimpang dari manajemen sehingga kemungkinan manajemen melakukan tindakan merugikan dapat dikuangi (Simamora *et al.*, 2014). Manajemen perusahaan menjadi tidak leluasa memanfaatkan diskresi untuk mengatur angka laba yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini

menyebabkan kualitas laba meningkat, sehingga informasi laba yang disajikan oleh manajemen kepada pemilik perusahaan dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Sesuai dengan pernyataan Darabali dan Saitri (2016) yang menyebutkan bahwa meningkatnya pengawasan dari komite audit mendorong informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih informatif dan berkualitas. Dalam penelitian ini, komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan yang mengacu pada penelitian Darabali dan Saitri (2016).

Penelitian Darabali dan Saitri (2016) menemukan bukti bahwa komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian Simamora *et al.* (2014) dan Pertiwi *et al.* (2017). Sedangkan, penelitian Yushita *et al.* (2013) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap kualitas laba dinyatakan sebagai berikut:

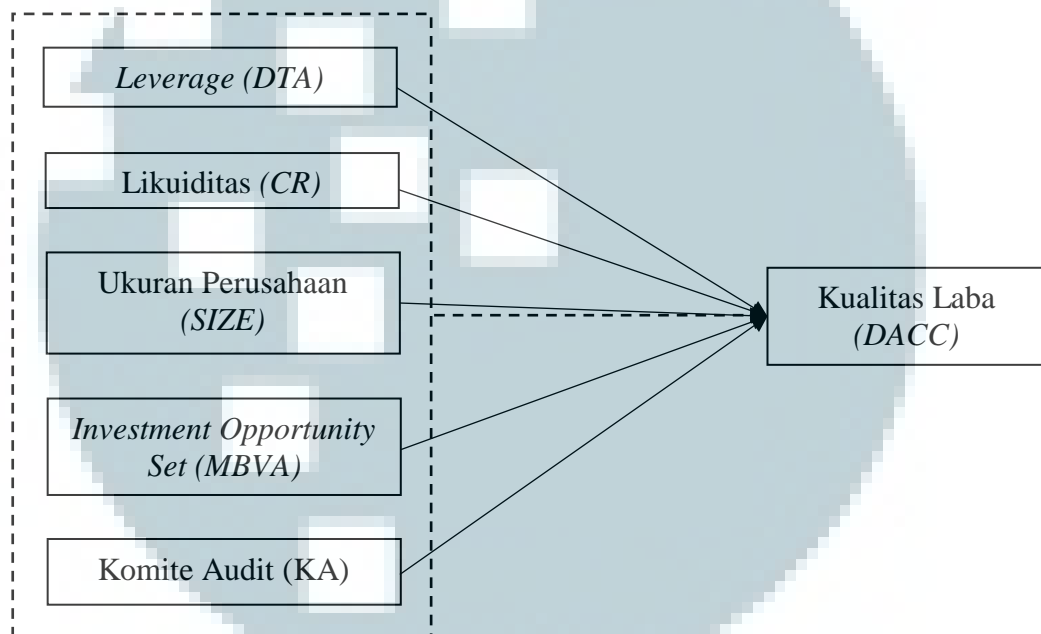
Ha₅: Komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba.

UMMN

2.10 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori dan hipotesis yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



UMMN

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Horngren *et al.* (2015), perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah komponen bahan baku dan mengkonversikannya menjadi barang jadi. Menurut situs BEI, sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terdiri dari 3 sektor, yaitu:

1. Sektor industri dasar dan kimia

Terbagi menjadi 8 sub-sektor, yaitu sub-sektor semen; sub-sektor keramik, porselen, dan kaca; sub-sektor logam dan sejenisnya; sub-sektor kimia; sub-sektor plastik dan kemasan; sub-sektor pakan ternak; sub-sektor kayu dan pengolahannya; dan sub-sektor pulp dan kertas.

2. Sektor aneka industri

Terbagi menjadi 6 sub-sektor, yaitu sub-sektor mesin dan alat berat; sub-sektor otomotif dan komponen; sub-sektor tekstil dan garmen; sub-sektor alas kaki; sub-sektor kabel; dan sub-sektor elektronika.

3. Sektor industri barang konsumsi

Terbagi menjadi 5 sub-sektor, yaitu sub-sektor makanan dan minuman; sub-sektor rokok; sub-sektor farmasi; sub-sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga; dan sub-sektor peralatan rumah tangga.